

# LAKIP

# 2019



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta penjelasan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

**Pangkalpinang, Februari 2020**

**KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**Drs. H. TARMIN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19681111 1990 1 001**

## IHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LAKIN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIN dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LAKIN ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan pada tahun 2019 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 6 sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, menunjukkan bahwa capaian pada 6 sasaran strategis masuk pada kategori sangat tinggi. Semua sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 pencapaiannya 100%. Realisasi capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza.	persentase angka kesakitan penyalahgunaan napza.	%	75%	75 %	100	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kebebasan dari Diskriminasi.	persentase ancaman kekerasan Diskriminasi.	%	58%	58%	100	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kebebasan berpendapat.	persentase ancaman kekerasan untuk berpendapat.	%	60%	60%	100	Sangat Baik
4.	Meningkatnya kebebasan berserikat , berkumpul dan Berkeyakinan.	persentase ancaman kekerasan kebebasan berserikat ,berkumpul dan Berkeyakinan.	%	60%	60%	100	Sangat Baik
5.	Menurunnya angka golput di masyarakat.	persentase angka golput.	%	35%	18%	100	Sangat Baik
6.	Peningkatan Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.	Skor peran lembaga demokrasi.	Nilai	74	63,76 skor	86,16	Baik

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

# BAB I

---

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Adanya tuntutan masyarakat telah mendorong Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*), melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2017–2022. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2019 merupakan tahun awal penjabaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2017 – 2022.

Pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 memiliki dua fungsi utama. *Pertama* merupakan sarana bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur. *Kedua*, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kedua fungsi utama ini merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja setiap Instansi Pemerintah.

## **I.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025.

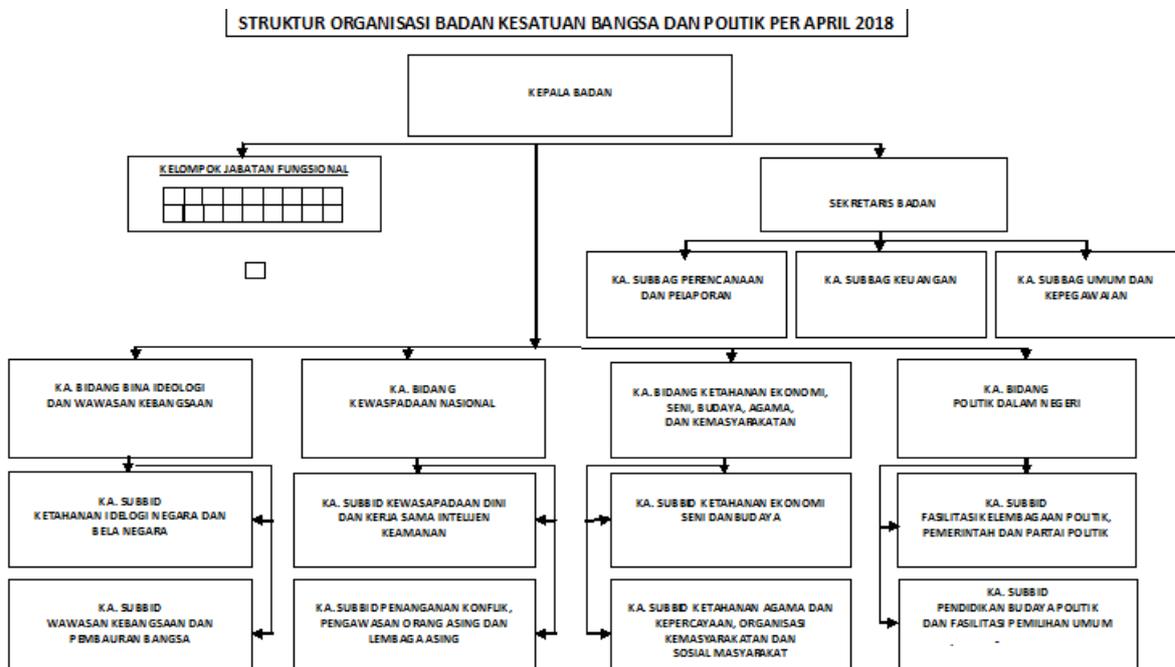
### **I.3 Struktur Organisasi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara garis besar Struktur Organisasi Badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini :

**BAGAN 1.**

**Struktur Organisasi Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

**I.4 Tugas Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 13 Seri D), Badan Kesatuan Bangsa dan politik mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a) penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b) pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c) pengoordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d) pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- e) pemberian fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f) pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

### I.5 Sumber Daya Manusia

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebanyak 38 orang. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel 1, terdiri dari 5 orang atau 13,2 % berpendidikan master/S2; 26 orang atau 68,4 % berpendidikan sarjana/S1; 2 orang atau 5,3 % Sarjana muda/D3, 5 orang atau 13,2 % berpendidikan SLTA. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel 1

**Tabel 1**  
**Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019**  
**Berdasarkan Pendidikan**

KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
		S3		S2		S1		NON S1		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
JPT	PRATAMA (Eselon II)			1						1
ADMINISTRASI	ADMINISTRATOR (Eselon III)			2		2	1			5
	PENGAWAS (Eselon IV)					8	2		1	11
	PELAKSANA									



KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN		TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH		
			S3		S2		S1			NON S1	
			L	P	L	P	L	P		L	P
	1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur			1			1			2
	2	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan					1				1
	3	Penyusun Kebutuhan Inventaris					1				1
	4	Pengadministrasian Umum								2	2
	5	Pemeriksa Pelaporan dan Transaksi Keuangan						1			1
	6	Verifikator Keuangan								1	1
	7	Bendahara							1		1
	8	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan						1			1
	9	Analisis Wawasan Kebangsaan					1	1			2
	10	Analisis Hubungan Antar Lembaga					1				1
	11	Analisis Politik Dalam Negeri						1			1
	12	Analisis Data dan Informasi					1				1
	13	Pengadministrasian Persuratan								2	2
	14	Analisis Pertahanan dan Keamanan					1				1
	15	Analisis Kemasyarakatan						1			1
FUNGSIONAL	1	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda					1				1
	1	Pranata Komputer Pertama					1				1
		<b>JUMLAH</b>			<b>4</b>		<b>18</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>38</b>

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Memperhatikan kondisi pegawai seperti tersebut di atas, berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki secara umum kekuatan aparatur Badan Kesatuan dan Politik cukup memadai.

## I.6 Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sampai saat ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup terpenuhi, misalnya saja setiap pegawai memiliki komputer sebagai alat bantu kerja yang utama. Kebutuhan akan listrik, telepon, faximili dan internet telah terpenuhi. Selain itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga telah memiliki server yang memuat database website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tabel 2 berikut menampilkan asset Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019**

(No	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
	A		<b>ASET TETAP</b>	<b>1</b>	<b>Rp.2.734.772.022</b>
1	01	01	TANAH	1	Rp 27.571.086
2	02		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>181</b>	<b>Rp. 1.640.006.751</b>
		02	Alat-alat Besar	1	<b>Rp. 137.750.000</b>
		03	Alat-alat Angkutan	2	Rp. 245.162.000
		04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	0	Rp. 13.850.000
		05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	0	0
		06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	162	Rp. 1.183.499.751
		07	Alat-alat Studio dan Komunikasi	15	Rp. 59.745.000
		08	Alat-alat Kedokteran	0	
		09	Alat-alat Laboratorium	0	
		10	Alat-alat Keamanan	0	
3	03		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>8</b>	<b>Rp.3.143.224.800</b>
		11	Bangunan Gedung	8	Rp.3.143.224.800
		12	Bangunan Monumen	0	0
4	04		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>0</b>	<b>Rp. 0</b>
		13	Jalan dan Jembatan	0	Rp. 0
		14	Bangunan Air / Irigasi	0	0
		15	Instalasi	0	0
		16	Jaringan	0	Rp. 0



(No)	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
5	05		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>Rp.68.950.625</b>
		17	Buku Perpustakaan	28	Rp.68.950.625
		18	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	0	Rp. 0
		19	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	0
			Lain-lain	0	0
6	06		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>0</b>	
7	B		<b>ASET LAINNYA</b>		Rp. 499.151.167
	01		Aset Tak Berwujud	0	0
	02		Aset Lain-lain	0	Rp. 0

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

### I.7 Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat alokasi dana sebesar Rp 11.826.682.126,- yang bersumber dari APBD meliputi Belanja Tidak Langsung Rp 6.140.733.646,- dan Belanja Langsung Rp 5.685.948.480,- yang diperuntukan bagi pelaksanaan 5 (lima) Program sebagaimana tertuang dalam Tabel 3

**Tabel 3**  
**Pagu Anggaran Tahun 2019**  
**Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO	PROGRAM	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL
1.	Belanja Pegawai	Rp 6.140.733.646,-	-	Rp 6.140.733.646,-
2.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Rp 2.974.254.680,-	Rp 2.974.254.680,-
3.	Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	-	Rp 212.898.000,-	Rp 212.898.000,-
4.	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		Rp 1.618.009.000,-	Rp 1.618.009.000,-
5.	Program Pembinaan Politik dalam Negeri	-	Rp 669.980.000,-	Rp 669.980.000,-

NO	PROGRAM	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL
6.	Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	-	Rp 210.806.800,-	Rp 210.806.800,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 5.308.351.860,11</b>	<b>Rp 6.140.733.646,-</b>	<b>Rp 11.826.682.126,-</b>
				<b>100 %</b>

Sumber : Subbag Keuangan Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Dana atau anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Rincian anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sumber pendanaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Anggaran Belanja Langsung Badan Kesbangpol**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019**

SUMBER DANA	BESAR ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
APBD	Rp 11.826.682.126,-	
APBN	Rp -	
TOTAL	Rp 11.826.682.126,-	100 %

Sumber : Subbag Keuangan Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

#### **A. Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyalahgunaan napza;
2. Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai – nilai pancasila di masyarakat;
3. Kurangnya Pemahaman dan Pendidikan Politik Masyarakat.;
4. Belum optimalnya Peran dan Fungsi Lembaga Demokrasi.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### II.1 Perencanaan Strategis

##### II.1.1 Visi Dan Misi

Memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2017-2022, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah

***“BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI”.***

Arti dan makna yang dimaksud adalah:

- **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
- **Sejahtera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
- **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
- **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
- **Teknologi** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

Untuk mewujudkan visi diatas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Misi Tahun 2017 – 2022**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO	MISI
1.	<b>Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;</b>
2.	<b>Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;</b>
3.	<b>Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;</b>
4.	<b>Meningkatkan kesehatan masyarakat ;</b>
5.	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;</b>
6.	<b>Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;</b>

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengemban pada **Misi ke 4. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat** dan **Misi ke 5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pembangunan demokrasi.**

Misi ke empat meningkatkan kesehatan masyarakat, Misi ini mengandung makna ***Kesehatan Masyarakat*** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

Misi ke lima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengemban pada Pembangunan Demokrasi yang mengandung makna ***Pembangunan demokrasi*** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

## II.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk memecahkan permasalahan serta untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2017 - 2022, ditunjukkan pada Tabel 6 berikut :

**Tabel 6**  
**Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO	TUJUAN
1.	Meningkatkan kesehatan masyarakat terhadap pengaruh penyalahgunaan napza;
2.	Meningkatkan kebebasan sipil dalam berkehidupan di masyarakat;
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
4.	Terwujudnya Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.

*Sumber : Renstra Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti dijelaskan pada tabel 7 Berikut:

Tabel 7

## Target capaian Sasaran Kinerja Bakesbangpol 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET AKHIR 2022
1.	Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza.	persentase angka kesakitan penyalahgunaan napza.	%	75%	25%
2.	Meningkatnya Kebebasan dari Diskriminasi.	persentase ancaman kekerasan Diskriminasi.	%	58%	25%
3.	Meningkatnya Kebebasan berpendapat.	persentase ancaman kekerasan untuk berpendapat.	%	60%	6,7%
4.	Meningkatnya kebebasan berserikat, berkumpul dan Berkeyakinan.	persentase ancaman kekerasan kebebasan berserikat, berkumpul dan Berkeyakinan.	%	60%	10%
5.	Menurunnya angka golput di masyarakat.	persentase angka golput.	%	35%	32%
6.	Peningkatan Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.	Skor peran lembaga demokrasi.	Nilai	74	75,50

Sumber : Renstra Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### II.1.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2017 – 2022 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan berdasarkan arah kebijakan daerah sebagaimana dalam RPJMD 2017 -2022 serta kebijakan internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga teknis daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif,

strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

**Tabel 8**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi.**

Misi IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesehatan masyarakat terhadap pengaruh penyalahgunaan napza.	Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza.	Antisipasi dan cegah dini terhadap penyalahgunaan napza.	Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap bahaya napza.
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.			
Meningkatkan kebebasan sipil dalam berkehidupan di masyarakat.	Meningkatnya Kebebasan dari Diskriminasi.	Memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekatunggalikaan dimasyarakat.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai - nilai kebangsaan dan kebhinekatunggalikaan
	Meningkatnya Kebebasan berpendapat.	Memperkuat kewaspadaan dan diteksi dini di masyarakat.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewaspadaan dan diteksi dini.
	Meningkatnya kebebasan berserikat , berkumpul dan Berkeyakinan.	Menguatkan peran aparat pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat.	Meningkatkan pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat.	Menurunnya angka golput di masyarakat.	Memperkuat pemahaman dan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi.	Meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam berdemokrasi.
Terwujudnya Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.	Peningkatan Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.	Meningkatkan harmoni dan sinergitas lembaga demokrasi dalam pembangunan bidang politik.	Peningkatan fungsi dan peran lembaga demokrasi dalam pembangunan bidang politik.

*Sumber : Renstra Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama (teknis) dan program pendukung (generik). Penjelasan program tersebut adalah :

a) Program teknis

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimulai dari menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik. Program ini berjumlah 4 (empat) program yaitu

1. Program Penguatan Kewaspadaan Nasional;
2. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri;
4. Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

b) Program generik

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya. Program ini berjumlah 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan.

### II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam usaha untuk mencapai sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merencanakan target kinerja tahun 2019. Semua sasaran dan indikator sasaran yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

**Tabel 9**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza.	persentase angka kesakitan penyalahgunaan napza.	75%	Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. <u>Kegiatan :</u> Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba.	Rp. 62.200.000,00
Meningkatnya Kebebasan dari Diskriminasi.	persentase ancaman kekerasan Diskriminasi.	58%	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. <u>Kegiatan :</u> 1. Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan; 2. Pembentukan, pendidikan dan pelatihan kader bela negara; 3. Penguatan forum pembauran kebangsaan (FPK); 4. Forum dialog penguatan ideologi bangsa (4 konsensus kebangsaan) dalam rangka mencegah budaya dan ideologi yang bertentangan dengan pancasila;	Rp. 1.618.009.000,00



SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)	PROGRAM/ KEGIATAN (4)	ANGGARAN (5)
			5. Revolusi mental di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 6. Peningkatan Kecintaan Terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
Meningkatnya Kebebasan berpendapat.	persentase ancaman kekerasan untuk berpendapat.	60%	Program Penguatan Kewaspadaan Nasional <u>Kegiatan :</u> 1. Penguatan Kerjasama Intelijen Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme di Bangka Belitung; 2. Forum Komunikasi dan Koordinasi KOMINDA; 3. Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini serta Pengawasan Orang Asing di Bangka Belitung; 4. Penyelenggaraan Penanganan Konflik sosial.	Rp. 212.898.000,00
Meningkatnya kebebasan berserikat , berkumpul dan Berkeyakinan.	persentase ancaman kekerasan kebebasan berserikat ,berkumpul dan Berkeyakinan.	80%	Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. <u>Kegiatan :</u> 1. Evaluasi Dan Verifikasi Data Ormas; 2. Forum Komunikasi Dan Kerjasama Antar Umat Beragama; 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ormas;	Rp. 148.606.800,00



SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)	PROGRAM/ KEGIATAN (4)	ANGGARAN (5)
			4. Evaluasi Data Dan Informasi Lembaga Usaha Ekonomi Serta Pemantauan Stabilitas Harga Sembako Di Daerah; 5. Workshop Optimalisasi Peran Aparatur, Ormas Dan Masyarakat Dalam Menjaga Seni Dan Budaya.	
Menurunnya angka golput di masyarakat.	persentase angka golput.	35%	Politik Dalam Negeri. Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada; 2. Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah; 3. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik; 4. Sosialisasi Undang-Undang Mengenai Politik.	Rp. 423.305.300,00
Peningkatan Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.	Skor peran lembaga demokrasi.	74	Program Pembinaan Politik Dalam Negeri. Kegiatan : 1. Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi Dalam Pembangunan Bidang Politik; 3. Peningkatan Kualitas Peran dan Fungsi Parpol dalam Rangka Penguatan Leadership dan Kaderisasi;	Rp. 246.674.700,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4. Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Parpol (KPPP); 5. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik.	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

## II.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA). Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019:

**Tabel 10**  
**Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza.	persentase angka kesakitan penyalahgunaan napza.	75%
2.	Meningkatnya Kebebasan dari Diskriminasi.	persentase ancaman kekerasan Diskriminasi.	35%
3.	Meningkatnya Kebebasan berpendapat.	persentase ancaman kekerasan untuk berpendapat.	60%

No	Sasaran	Indikator	Target
4.	Meningkatnya kebebasan berserikat, berkumpul dan Berkeyakinan.	persentase ancaman kekerasan kebebasan berserikat, berkumpul dan Berkeyakinan.	60%
5.	Menurunnya angka golput di masyarakat.	persentase angka golput.	35%
6.	Peningkatan Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.	Skor peran lembaga demokrasi.	74

Sumber : Renstra Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### II.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Anggaran	Persentase
1.	Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba.	Rp. 62.200.000,00	2,00
2.	Meningkatnya Kebebasan dari Diskriminasi.	Rp. 1.618.009.000,00	53,56
3.	Meningkatnya Kebebasan berpendapat.	Rp. 212.898.000,00	15,58
4.	Meningkatnya kebebasan berserikat, berkumpul dan Berkeyakinan.	Rp. 148.606.800,00	6,22
5.	Menurunnya angka golput di masyarakat.	Rp. 423.305.300,00	11,94
6.	Peningkatan Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.	Rp. 246.674.700,00	10,70

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1 Pengukuran Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel 12**

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

∞ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 13 berikut:

**Tabel 13**  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza.	persentase angka kesakitan penyalahgunaan napza.	%	75%	75 %	620	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kebebasan dari Diskriminasi.	persentase ancaman kekerasan Diskriminasi.	%	58%	58%	166,67	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kebebasan berpendapat.	persentase ancaman kekerasan untuk berpendapat.	%	60%	60%	200	Sangat Baik
4.	Meningkatnya kebebasan berserikat , berkumpul dan Berkeyakinan.	persentase ancaman kekerasan kebebasan berserikat ,berkumpul dan Berkeyakinan.	%	60%	60%	166,67	Sangat Baik
5.	Menurunnya angka golput di masyarakat.	persentase angka golput.	%	35%	18%	100	Sangat Baik
6.	Peningkatan Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.	Skor peran lembaga demokrasi.	Nilai	74	63,76 skor	86,16	Sangat Baik

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Tabel 13**  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza.	persentase angka kesakitan penyalahgunaan napza.	%	95%	71,49 %	620	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kebebasan dari Diskriminasi.	persentase ancaman kekerasan Diskriminasi.	%	75%	41,67%	166,67	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kebebasan berpendapat.	persentase ancaman kekerasan untuk berpendapat.	%	80%	40%	200	Sangat Baik

4.	Meningkatnya kebebasan berserikat, berkumpul dan Berkeyakinan.	persentase ancaman kekerasan kebebasan berserikat, berkumpul dan Berkeyakinan.	%	80%	66,67%	166,67	Sangat Baik
5.	Menurunnya angka golput di masyarakat.	persentase angka golput.	%	38,64%	38,64%	100	Sangat Baik
6.	Peningkatan Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.	Skor peran lembaga demokrasi.	Nilai	73,50	73,50 skor	100	Sangat Baik

Berdasarkan uraian pada Tabel 13 diatas, maka rangkuman hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja sasaran, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

<b>Tabel 14</b> <b>Rangkuman Hasil Pengukuran Kinerja</b>				
No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat
1	Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza.	1	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kebebasan dari Diskriminasi	1	100	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kebebasan berpendapat.	1	100	Sangat Baik
4	Meningkatnya kebebasan berserikat, berkumpul dan Berkeyakinan.	1	100	Sangat Baik
5	Menurunnya angka golput di masyarakat.	1	100	Sangat Baik
6	Peningkatan Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.	1	86,16	Sangat Baik

Dari tabel 14 di atas terdapat empat sasaran strategis yang terbagi ke dalam 6 (enam) indikator sasaran strategis. Pada tahun 2019, terdapat 5 (lima) indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan atau telah mencapai 100% untuk masing-masing indikator dari total indikator sedangkan satu indikator tidak tercapai target yang ditetapkan atau 86,16 % yaitu pada indikator peningkatan peran

lembaga demokrasi yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja telah memenuhi klasifikasi sangat baik berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

### III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1 : “Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza”.**

Tolok ukur capaian sasaran menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase angka kesakitan penyalahgunaan napza.

Hasil evaluasi capaian kinerja menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**Capaian kinerja sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018 %	2019			Capaian Akhir Renstra (2022) %
			Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	persentase angka kesakitan penyalahgunaan napza.	71,49	75	75	100	25

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator 1 : Persentase angka kesakitan penyalahgunaan napza.

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase angka kesakitan penyalahgunaan napza adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah angka kesakitan penyalahgunaan napza selama 1 tahun}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Jumlah angka kesakitan  
penyalahgunaan napza

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-1 pada tahun 2019 telah melebihi target sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 75% mampu direalisasikan sebesar 69,88%. Indikator ini digunakan pada tahun 2019 untuk mengukur tingkat capaian angka kesakitan penyalahgunaan napza, sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pelaksanaan sosialisasi penyalahgunaan napza dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi penyalahgunaan napza pada tahun berikutnya.

Berikut ini adalah daftar kasus Narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019;

**Tabel 16**

Pencandu Rehab BNNP dan BNNK

NO	WILAYAH	2017	2018	2019
1.	Polda Kep. Babel	84	113	90
2.	Polres Pangkalpinang	36	74	41
3.	Polres Bangka	46	48	41
4.	Polres Bangka Tengah	22	18	24
5.	Polres Bangka Selatan	22	42	39
6.	Polres Bangka Barat	60	45	41
7.	Polres Belitung	11	14	11
8.	Polres Belitung Timur	6	7	5
9.	BNNP Prov. Kep. Babel	10	11	12
<b>TOTAL</b>		<b>297</b>	<b>372</b>	<b>304</b>

Sumber : BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah kasus Narkoba yang ditangani Polisi dan BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 297 kasus , sedangkan pada tahun 2018 jumlah kasus Narkoba yang ditangani oleh Polisi dan BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat berjumlah 372 kasus atau meningkat sebesar 25,3 % dari Tahun 2017 dan pada tahun 2019 jumlah kasus Narkoba yang ditangani

Polisi dan BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 304 Kasus menurun sebesar 22,4% dari Tahun 2018.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 1 adalah :

- Komitmen yang tinggi dari masing-masing koordinator kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan;
- Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- Pergub Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- Adanya Sinergi dan kerjasama yang baik dengan lembaga negara yang berwenang dalam penyediaan data, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepolisian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Potensi Hambatan

- Kecilnya persentase anggaran yang diberikan untuk mendukung indikator sasaran I sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
- Masih adanya SDM dari beberapa perangkat daerah yang menganggap kurang pentingnya sebuah data dan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Strategi Pemecahan

- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
- Lebih mengintensifkan koordinasi dengan BNNP dan BNNK Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepolisian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung serta pengecekan kemajuan pengolahan data secara rutin.

Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja sasaran I:

Untuk Sasaran I yaitu menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza dengan target indikator 75% dialokasikan anggaran sebesar Rp. 62.200.000,00 dalam pencapaiannya untuk sasaran I tidak ada efisiensi anggaran karena sudah dilaksanakan efisiensi anggaran pada APBD perubahan.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran I yaitu Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika.

#### **Sasaran II : “Meningkatnya Kebebasan dari Diskriminasi”.**

Tolok ukur capaian sasaran ke-2 meningkatnya kebebasan dari diskriminasi, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase ancaman kekerasan diskriminasi.

Hasil evaluasi capaian kinerja kebebasan dari diskriminasi dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 17**

#### **Capaian kinerja sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018 %	2019			Capaian Akhir Renstra (2022) %
			Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	persentase ancaman kekerasan diskriminasi	66,67	58	58	100	25

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diolah

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

Jumlah ancaman kekerasan diskriminasi selama 1 thn	X 100 %
Jumlah ancaman kekerasan diskriminasi	

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-2 pada tahun 2019 telah memenuhi target sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 58% mampu direalisasikan sebesar 58%.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 2 adalah :

- Komitmen yang tinggi dari masing-masing koordinator kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Potensi Hambatan

- Kecilnya persentase anggaran yang diberikan untuk mendukung indikator sasaran I sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
- Program/kegiatan yang sudah didesain terhadap pencapaian Indikator atau pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/kegiatan yang sudah disiapkan;
- Adanya Rasionalisasi Anggaran yang di lakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berakibat pada rasionalisasi kegiatan pada sasaran II sehingga pencapaian kinerja pada sasaran II tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Strategi Pemecahan

- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk Sasaran II yaitu meningkatnya kebebasan dari diskriminasi dengan target indikator 58% dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.618.009.000,00 dalam pencapaiannya dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 7,47%.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran II yaitu Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
2. Pembentukan, pendidikan dan pelatihan kader bela negara;
3. Penguatan forum pembauran kebangsaan (FPK);
4. Forum dialog penguatan ideologi bangsa (4 konsensus kebangsaan) dalam rangka mencegah budaya dan ideologi yang bertentangan dengan pancasila;
5. Revolusi mental di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **Sasaran III : “Meningkatnya Kebebasan berpendapat”.**

Tolok ukur capaian sasaran ke-3 Meningkatkan kebebasan berpendapat, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase ancaman kekerasan untuk berpendapat.

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatkan kebebasan berpendapat dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 18**  
**Capaian kinerja sasaran 3**

No	Indikator Kinerja	Capaian 201 %	2019			Capaian Akhir Renstra (2022) %
			Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	Persentase ancaman kekerasan untuk berpendapat	40	60	60	100	6,7

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diolah

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah ancaman kekerasan berpendapat selama 1 tahun}}{\text{Jumlah ancaman kekerasan berpendapat}} \times 100 \%$$

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-3 pada tahun 2019 telah memenuhi target sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 60% mampu direalisasikan sebesar 60%.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 3 adalah :

- Komitmen yang tinggi dari masing-masing koordinator kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan

Potensi Hambatan

- Kecilnya persentase anggaran yang diberikan untuk mendukung indikator sasaran III sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
- Program/kegiatan yang sudah didesain terhadap pencapaian Indikator atau pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/kegiatan yang sudah disiapkan.

Strategi Pemecahan

- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk Sasaran III yaitu Meningkatnya kebebasan berpendapat dengan target indikator 60% dialokasikan anggaran sebesar Rp. 212.898.000,00 dalam pencapaiannya dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 47,53%.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran III yaitu Program Penguatan Kewaspadaan Nasional dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kerjasama Intelijen Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme di Bangka Belitung;
2. Forum Komunikasi dan Koordinasi KOMINDA;
3. Penguatan Kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing di Bangka Belitung;
4. Penyelenggaraan penanganan konflik sosial.

**Sasaran IV : “Meningkatnya kebebasan berserikat , berkumpul dan Berkeyakinan”.**

---

---

Tolok ukur capaian sasaran ke-4 Meningkatnya kebebasan berserikat, berkumpul dan berkeyakinan, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase ancaman kekerasan kebebasan berserikat, berkumpul dan Berkeyakinan.

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kebebasan berserikat, berkumpul dan berkeyakinan dengan 1 (satu) indikator, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 19**  
**Capaian kinerja sasaran 4**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018 %	2019			Capaian Akhir Renstra (2022) %
			Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	persentase ancaman kekerasan kebebasan berserikat, berkumpul dan Berkeyakinan	66,67	60	60	100	10

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diolah

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah ancaman kekerasan, kebebasan berserikat, berkumpul dan berkeyakinan selama 1 thn}}{\text{Jumlah ancaman kekerasan, kebebasan berserikat, berkumpul dan berkeyakinan tahun awal}} \times 100 \%$$

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-4 pada tahun 2019 telah memenuhi target sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 60% mampu direalisasikan sebesar 60%.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 4 adalah :

- Komitmen yang tinggi dari masing-masing koordinator kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan

#### Potensi Hambatan

- Program/kegiatan yang sudah didesain terhadap pencapaian Indikator atau pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/kegiatan yang sudah disiapkan;
- Adanya rasionalisasi anggaran yang di lakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berakibat pada rasionalisasi kegiatan pada sasaran IV sehingga pencapaian kinerja pada sasaran IV tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

#### Strategi Pemecahan

- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk Sasaran IV yaitu Meningkatnya kebebasan berserikat, berkumpul dan berkeyakinan dengan target indikator 60% dialokasikan anggaran sebesar Rp. 148.606.800,00 dalam pencapaiannya dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 16,31%.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran IV yaitu Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi Dan Verifikasi Data Ormas;
2. Forum Komunikasi Dan Kerjasama Antar Umat Beragama;
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ormas;
4. Evaluasi data dan informasi lembaga usaha ekonomi serta pemantauan stabilitas harga sembako di daerah;
5. Workshop Optimalisasi Peran Aparatur, Ormas Dan Masyarakat Dalam Menjaga Seni Dan Budaya.

**Sasaran V : “Menurunnya angka golput di masyarakat”.**

Tolok ukur capaian sasaran ke-5 menurunnya angka golput di masyarakat, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase angka golput.

Hasil evaluasi capaian kinerja menurunnya angka golput di masyarakat dengan 1 (satu) indikator, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 20**  
**Capaian kinerja sasaran 5**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018 %	2019			Capaian Akhir Renstra (2022) %
			Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	persentase angka golput.	38,64	35	17	100	32

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diolah

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah seluruh pemilih} - (\text{total suara tidak sah} + \text{total suara sah}))}{\text{Jumlah seluruh pemilih (DPT + DPTB + DPPH)}} \times 100 \%$$

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-5 pada tahun 2018 telah tercapai sesuai target sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 35% mampu direalisasikan sebesar 17%.

**Tabel 21**

NO	PARTISIPASI	PARTISIPASI (%)	GOLPUT
	<b>PEMULI 2014</b>		
1	PARTISIPASI PEMILIH ANGGOTA DPR RI	72,52 %	27,48 %
2	PARTISIPASI PEMILIH ANGGOTA DPRD	72,52 %	27,48 %
3	PARTISIPASI PEMILIH ANGGOTA DPD	72,50 %	27,5 %
4	PARTISIPASI PEMILIH PRESIDEN	65,59 %	34,41 %

		PARTISIPASI (%)	GOLPUT
	<b>PEMILUKADA 2015</b>		
1	PARTISIPASI PEMILIH KAB BELTIM	76,70 %	23,3 %
2	PARTISIPASI PEMILIH KAB BASEL	61,30 %	38,7 %
3	PARTISIPASI PEMILIH KAB BABAR	66,11 %	33,89 %
4	PARTISIPASI PEMILIH KAB BATENG	64,11 %	35,89 %
	<b>PEMILUKADA 2017</b>		
1	PARTISIPASI PEMILIH GUBERNUR	61,36 %	38,64 %
	<b>PEMILUKADA 2018</b>		
1	PARTISIPASI PEMILIH KAB BANGKA	62,22 %	37,78 %
2	PARTISIPASI PEMILIH KAB BELITUNG	74,35 %	25,65 %
3	PARTISIPASI PEMILIH PANGKALPINANG	61,12 %	38,88 %
	<b>PEMILU 2019</b>		
1	PARTISIPASI PEMILIH PRESIDEN	82,75 %	17,25 %
2	PARTISIPASI PEMILIH DPR RI	82,39 %	17,61 %
3	PARTISIPASI PEMILIH DPD RI	82,39 %	17,61 %
4	PARTISIPASI PEMILIH DPRD PROV	78,32 %	21,68 %
5	PARTISIPASI PEMILIH DPRD KOTA	78,32 %	21,68 %
6	PARTISIPASI PEMILIH DPRD KAB BELTIM	83,54 %	16,46 %
7	PARTISIPASI PEMILIH DPRD KAB BELITUNG	83,22 %	16,78 %
8	PARTISIPASI PEMILIH DPRD KAB BATENG	83,57 %	16,43 %
9	PARTISIPASI PEMILIH DPRD KAB BABAR	84,61 %	15,39 %
10	PARTISIPASI PEMILIH DPRD KAB BASEL	83,59 %	16,41 %
11	PARTISIPASI PEMILIH KAB BANGKA	81,03 %	18,97 %

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa angka golput dari pemilu tahun 2014 sampai dengan pemilu tahun 2019 mengalami penurunan begitu juga dengan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu dari tahun 2014 sampai dengan pemilu tahun 2019 mengalami peningkatan.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran V adalah :

- Komitmen yang tinggi dari masing-masing koordinator kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Potensi Hambatan

- Program/kegiatan yang sudah didesain terhadap pencapaian Indikator atau pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/kegiatan yang sudah disiapkan.
- Adanya rasionalisasi anggaran yang di lakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berakibat pada rasionalisasi kegiatan pada sasaran V sehingga pencapaian kinerja pada sasaran V tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

#### Strategi Pemecahan

- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk Sasaran IV yaitu menurunnya angka golput di masyarakat dengan target indikator 38,64 % dialokasikan anggaran sebesar Rp. 258.072.860,00 dalam pencapaiannya dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 6,01%.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran V yaitu Program Pembinaan Politik Dalam Negeri dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Monitoring dan Pemantapan Perkembangan Situasi Politik di Daerah;
2. Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik.

#### **Sasaran VI : “Peningkatan Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas”.**

Tolok ukur capaian sasaran ke-6 peningkatan peran lembaga demokrasi yang berkualitas, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Skor peran lembaga demokrasi.

Hasil evaluasi capaian kinerja peningkatan peran lembaga demokrasi yang berkualitas dengan 1 (satu) indikator, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 86,16% dengan predikat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 22**  
**Capaian kinerja sasaran 6**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017 %	2018			Capaian Akhir Renstra (2022) skor
			Target skor	Realisasi skor	% Realisasi	
1	persentase angka golput.	73,50	74	63,76 skor	86,16	75,50

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diolah

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

Jumlah Nilai Variabel Lembaga Demokrasi (Nilai IDI)

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-6 pada tahun 2019 telah tercapai sesuai target sebesar 86,16%, dari target yang ditetapkan sebesar 73,50% mampu direalisasikan sebesar 86,16%.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran IV adalah :

- Komitmen yang tinggi dari masing-masing koordinator kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Potensi Hambatan

- Program/kegiatan yang sudah didesain terhadap pencapaian Indikator atau pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/kegiatan yang sudah disiapkan.

Strategi Pemecahan

- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk Sasaran VI yaitu peningkatan peran lembaga demokrasi yang berkualitas dengan target indikator 74 % dialokasikan anggaran sebesar Rp. 246.674.700,00 dalam pencapaiannya dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 20,63%.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran VI yaitu Program Pembinaan Politik Dalam Negeri dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik.

### **III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 91,35% dari total anggaran yang dialokasikan, Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 86,79% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,52%, Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya Kebebasan dari Diskriminasi (92,53%), Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ke-3 yaitu Meningkatnya kebebasan berpendapat (52,46%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 23 berikut:

TABEL 23  
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER SASARAN TAHUN 2018

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target Rp.	Realisasi Rp.	% Realisasi
1	Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza	75%	75%	100	62.200.000,00	55.792.200,00	89,70
2	Meningkatnya kebebasan berserikat, berkumpul dan Berkeyakinan.	60%	60%	100	148.606.800,00	124.362.840,00	83,69
3	Meningkatnya Kebebasan dari Diskriminasi.	58%	58%	100	1.618.009.000,00	1.497.103.650,00	92,53
4	Meningkatnya Kebebasan berpendapat.	60%	60%	100	212.898.000,00	111.690.694,00	52,46
5	Menurunnya angka golput di masyarakat.	35%	17%	100	423.305.300,00	368.661.600,00	87,09
6	Peningkatan Peran Lembaga demokrasi yang berkualitas.	74 skor	63,76 skor	86,16	246.674.700,00	195.779.252,00	79,37
Jumlah					2.711.693.800,00	2.353.390.236,00	
Belanja Langsung Pendukung					2.974.254.680,00	2.840.981.605,00	
Total Belanja Langsung					5.685.948.480,00	5.194.371.841,00	

Sumber: Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Capaian realisasi keuangan program/kegiatan yang menunjang sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bervariasi antara rendah hingga baik. Selain faktor kecermatan dalam perencanaan anggaran, ketepatan waktu memulai, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan; faktor pengambilan keputusan memanfaatkan momen perubahan anggaran pada pertengahan tahun anggaran sangat menentukan keberhasilan untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan di masa mendatang.

#### D. Tindak Lanjut atas Evaluasi Laporan Kinerja T.A 2018

Hasil evaluasi dari Inspektorat, Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 76,81 dengan interpretasi predikat BB (sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal), perlu perbaikan.

1. Rekomendasi Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018

- a. Melakukan Pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
  - b. Melaksanakan evaluasi program dan rencana aksi secara optimal dengan dilakukan secara periodik minimal triwulan agar hasil evaluasi program dan rencana aksi dapat segera ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dalam bentuk langkah-langkah nyata di masa yang akan datang; dan
  - c. Meningkatkan kinerja agar tercapai keluaran dan hasil yang ditargetkan.
2. Tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. Mengupayakan dalam pengukuran kinerja dapat menggunakan teknologi informasi;
- b. Melakukan evaluasi terhadap program dan rencana aksi pertriwulan dan telah melakukan perbaikan program dan rencana aksi sebagai langkah-langkahnya yang akan di ambil pada tahun 2018 ini;
- c. Telah melakukan perbaikan capaian kinerja program dan sasaran;
- d. Telah melakukan monitoring terhadap target kinerja eselon III dan IV;
- e. Membuat rencana aksi atas kinerja.

## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019, serta Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi dan misi provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 6 (enam) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana
2. Hasil analisis 6 (enam) indikator sasaran, 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu persentase angka kesakitan penyalahgunaan napza, persentase ancaman kekerasan



Diskriminasi, persentase ancaman kekerasan untuk berpendapat, persentase ancaman kekerasan kebebasan berserikat, berkumpul dan Berkeyakinan, persentase angka golput, Skor peran lembaga demokrasi pada tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**Pangkalpinang, Februari 2020**

**KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**Drs. H. TARMIN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19681111 1990 1 001**